

Tolak Takhta, Kembali ke Politik

Oleh Amandus B.S. Klau

Romo Yudel memberi judul pada bukunya, “Imam Berpolitik: Bolehkah?” Sebuah judul dalam rupa kalimat tanya, yang terasa rada gampang sekaligus sulit untuk dijawab. Mengapa?

“Apakah boleh seorang imam berpolitik” adalah sebuah pertanyaan klasik-retoris. Disebut retoris karena Romo Yudel sendiri sebagai penanya dan para pembaca sudah mengetahui jawabannya. Sedangkan, disebut klasik karena masalah yang diangkat Romo Yudel dalam bukunya itu bukanlah hal yang baru. Wacana tentang boleh atau tidak boleh seorang imam berpolitik sudah setua eksistensi Gereja itu sendiri.¹

Selain itu, jawaban boleh atau tidak boleh seorang imam berpolitik sangat bergantung pada sempit luasnya definisi dan pemahaman politik yang dimiliki oleh orang yang hendak memberikan jawaban.

Term “politik” bisa saja didefinisikan secara sangat sempit, dan karena itu menutup ruang bagi partisipasi seorang imam Katolik. Atau, sebaliknya, politik didefinisikan secara sangat luas, dan karena itu membuka ruang bagi partisipasi seorang imam Katolik.

Jika politik didefinisikan sebagai “usaha menggapai kehidupan yang baik,”² niscaya seorang imam akan terlibat dan mengambil bagian di dalamnya, sebab ia sebagai manusia tentu saja mempunyai ikhtiar untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.

¹ Sejak periode pascarasuli, tugas pelayanan pastoral para gembala secara tegas dibedakan dan dipisahkan dari tugas kaum awam. Dalam *Didache* atau salah satu tulisan awal pasca-Perjanjian Baru, ditegaskan bahwa seorang gembala atau penilik harus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia harus rendah hati dan tidak tamak akan uang (tidak mencari hormat, kedudukan, dan uang). Selain itu, dalam *Surat-surat Ignatius* (tahun 110 Masehi), ditegaskan bahwa dalam pelayanannya, seorang imam atau penatua harus taat kepada Uskup sebagai pejabat Gereja yang mendapatkan kekuasaan dari Allah. Hal ini sangat penting, sebab pelayanan lipat tiga, yakni uskup, imam, dan penatua merupakan inti Gereja. Bdk., Derek J. Tidball, *Teologi Penggembalaan, Suatu Pengantar*, penerj. M. Rumkeny M.A. (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2021), hlm. 144-155.

² Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 13.

Sebaliknya, jika “politik” dipahami sesempit definisi negatif Peter Merkl,³ niscaya ruang partisipasi sungguh tertutup bagi seorang imam Katolik. Merkl, secara negatif, mendefinisikan politik sebagai, “Perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.”⁴

Jika pertanyaan Romo Yudel, “bolehkah seorang imam berpolitik” diajukan dalam konteks pemahaman politik sebagaimana didefinisikan oleh Merkl, niscaya jawabannya sudah pasti, “tidak boleh”, sebab partisipasi politik seorang imam Katolik tidak bisa dijalankan di luar “koridor” atau “rambu-rambu” aturan yang telah ditetapkan oleh Gereja.

Tentang rambu-rambu tersebut, Romo Yudel menulis sebagai berikut:

Imam boleh berpolitik untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, tetapi tidak boleh berpolitik praktis.⁵ Seorang imam tidak boleh bergabung menjadi anggota salah satu partai politik, tidak boleh menjadi anggota tim kampanye dan terlibat mengampanyekan kandidat dari partai politik tertentu. Seorang imam juga tidak boleh menerima sogokan untuk memenangkan paket politik tertentu. Sebab, atas cara itu, ia mengkhinai tugasnya sendiri sebagai seorang gembala yang harus menjaga persekutuan dan persatuan umatnya. Seorang imam tidak harus menjadi “politisi”⁶ untuk memperjuangkan kesejahteraan umum. Idealnya, politik berikhtiar mencapai kesejahteraan umum melalui perhatian dan pembuatan kebijakan. Tetapi, karena seorang imam bukanlah “politisi”, maka hal yang bisa dilakukannya adalah dengan cara yang tidak melanggar aturan Gereja

³ Peter Merkl adalah profesor emeritus bidang *comparative politics* pada Department of Political Science Universitas California Santa Barbara, Amerika Serikat.

⁴ Prof. Miriam Budiarjo, *op. cit.*, hlm. 16.

⁵ Sebenarnya tidak ada pemisahan antara politik praktis dan politik teoretis. Yang disebut politik selalu serentak praktis dan teoretis. Sebab, suatu tindakan politik selalu merupakan aplikasi dari teori tertentu, dan sebaliknya suatu teori politik tidak pernah tidak berangkat dari praktik tertentu. Karena itu, sebutan politik praktis di sini harus dipahami sebagai politik yang berorientasi kekuasaan dan keuntungan finansial, sebagaimana definisi negatif Peter Merkl tentang politik.

⁶ Politisi yang dimaksudkan di sini adalah para pencari kuasa, kedudukan, dan keuntungan finansial sebagaimana definisi negatif Peter Merkl.

memperjuangkan martabat manusia, yang mencakup kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan jasmaniah.⁷

Selanjutnya, mengutip *Gaudium et Spes* (GS), Romo Yudel menambahkan bahwa, “Gereja tidak dapat dicampuradukkan dengan negara. Gereja tidak terikat pada sistem politik mana pun. Gereja dan negara sama-sama otonom dan tidak tergantung satu sama lain.”⁸

Namun demikian, Gereja Katolik tetap memandang perlu mendorong negara dan para pejabatnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta memajukan dan meluaskan keadilan dan cinta kasih. Tugas Gereja Katolik adalahewartakan kebenaran Injil dan mendorong agar semua bidang manusiawi diterangi oleh ajaran Tuhan Yesus. Gereja Katolik mendukung umatnya untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pemimpin negara demi mewujudkan cita-cita keadilan, cinta kasih, dan kesejahteraan umum.

Gereja Katolik memiliki tanggung jawab teramat mulia untuk memastikan bahwa para pemimpin negara sanggup merealisasikan keadilan, cinta kasih, dan kesejahteraan umum. Gereja Katolik juga menilai dan mendorong praktik politik yang semakin diterangi oleh cinta kasih Kristus dan yang semakin memajukan harkat dan martabat manusia.

Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan praktik politik yang “diterangi cinta kasih Kristus” itu?

Setelah mencermati seluruh isi buku karya Romo Yudel ini, saya berpendapat bahwa implikasi praktis dari pandangan Gereja mengenai bagaimana seharusnya seorang imam berpolitik tidak menjadi fokus perhatian Romo Yudel. Karya yang dihasilkan Romo Yudel ini lebih layak disebut “proyek re-afirmasi”.

Seakan-akan dirinya dan para pembaca belum mengetahui sikap dan pandangan Gereja mengenai negara, politik, dan bentuk keterlibatan politik seorang imam Katolik yang dibolehkan, ia mengajukan pertanyaan, “Bolehkah seorang imam berpolitik?” Kemudian, sambil mengutip sikap dan pandangan Gereja yang tertuang dalam sejumlah dokumen, ia menegaskan bahwa seorang

⁷ Yudel Neno, *Imam Berpolitik: Bolehkah?* Hlm. 102-103.

⁸ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana SJ, cetakan ke-9 (Jakarta: Obor 2008), hlm. 629.

imam boleh berpolitik, dengan catatan tidak boleh keluar dari batasan-batasan atau “tanda larang” aturan Gereja.

Secara akademis, “proyek re-afirmasi” atau sekadar penegasan ulang seperti ini tidak mempunyai *novelty*. Tidak ada sesuatu pun yang baru dalam karya ini, karena sang penulis hanya mengutip atau sekadar mengulang kembali isi dokumen-dokumen Gereja untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan diajukannya sebagai alasan pergulatan akademisnya.

Akan tetapi, jika dikonfrontasikan dengan realitas sosial-politik masyarakat NTT, tema yang diangkat Romo Yudel ini sangat relevan. Alasannya, partisipasi politik para imam yang cenderung menerobos batas “larangan Gereja” selalu terjadi setiap kali ada hajatan pemilihan pemimpin, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala-kepala daerah dan para wakil rakyat. Tidak jarang para pastor memberikan “mimbar gereja” kepada para calon yang didukungnya, dan sebaliknya menutup rapat-rapat bagi calon yang tidak mereka sukai. Tak jarang para pastor menyanjung pribadi dan program politik dari pasangan kandidat tertentu, dan sebaliknya mengecam habis-habisan pribadi atau program politik kandidat lain dalam khotbah-khotbah mereka.⁹

Menyikapi fenomena-fenomena politik tersebut, seruan Romo Yudel agar para pastor atau imam tidak terlibat dalam politik praktis pada satu sisi dan harus berpolitik sesuai dengan sikap dan pandangan Gereja di sisi lain menjadi relevan, penting, dan bahkan urgen untuk dibicarakan. Sebab, jika para imam turut berpolitik sesuai dengan aturan Gereja dan menyediakan prinsip subsidiaritas¹⁰ sebagai landasan pelayanan kolaboratif negara dan Gereja kelak, niscaya cita-cita pemuliaan harkat dan martabat manusia serta perwujudan kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat/umat dapat tercapai.

⁹ Yudel Neno, *op.cit.* hlm. 74.

¹⁰ Prinsip subsidiaritas adalah prinsip pembagian tanggung jawab untuk mengusahakan kepentingan masyarakat; mana yang menjadi tanggung jawab negara dan mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam prinsip ini, negara harus memberikan bantuan kepada anggota-anggotanya atau kepada komponen masyarakat sejauh anggota atau komponen itu tidak menyelesaikan tugasnya secara memuaskan. Sedangkan, apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh mereka tidak boleh diambil alih oleh negara. Negara mesti memainkan peranan yang menunjang usaha masyarakat, bukan sebaliknya menggantikan usaha masyarakat. Gereja adalah bagian dari masyarakat, yang dapat mengupayakan kesejahteraan masyarakat, karena itu negara harus memberinya ruang, bahkan berkolaborasi dengannya. Bdk. Norbertus Jegalus, “Hubungan Antara Negara dan Gereja: Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,” *Jurnal Ledalero*, 12:2, (Ledalero: Desember 2013), hlm. 226.

Selain itu, jika para imam tidak mengejar kekuasaan dan keuntungan lain dalam berpolitik, dan sebaliknya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab pengembalaan untuk mengarahkan politik praktis kepada suatu tindakan etis, maka sejumlah fenomena “aneh” yang meresahkan orang-orang waras di jagat politik selama ini bisa perlahan diatasi.

Fenomena paling umum dan lazim terjadi di Indonesia saat ini adalah praktik politik yang didasarkan pada kesadaran naif bahwa orang baru dapat berpolitik kalau menduduki jabatan politik tertentu.

Akibat dari kesadaran naif itu, orang beramai-ramai merebut takhta kekuasaan pada setiap hajatan politik, baik takhta kuasa legislatif maupun eksekutif. Orang menjadi tidak sadar bahwa jabatan legal formal sebagai hasil hajatan politik lima tahunan itu hanya salah satu dari sumber-sumber kekuasaan politik yang dimiliki setiap orang, yang bisa diefektifkan dan dimanfaatkan kapan pun untuk menata kehidupan bersama.

Orang merasa tidak aneh, jika misalnya seorang profesional menyatakan dirinya baru bisa memainkan peran politiknya setelah merebut takhta kekuasaan dan menduduki jabatan publik tertentu. Orang merasa tidak aneh, jika misalnya seorang dokter, perawat, dosen, guru, ASN, pengusaha, pengurus Koperasi, arsitek, pekerja sosial, dan petani ulet meninggalkan profesi mereka dan berkontestasi merebut kursi kekuasaan legislatif dan eksekutif guna memainkan peran politik mereka.

Padahal, tanpa menjadi seorang anggota legislatif atau seorang bupati, para profesional tersebut telah memainkan peran politik mereka dan ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Seorang dosen atau guru, misalnya, sebenarnya tidak perlu mengimpikan kursi kuasa legislatif atau eksekutif, apalagi merasa lebih rendah dari seorang pejabat pemerintah. Sebab, dengan menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan siswa yang cerdas setiap tahun, mereka sebenarnya telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan SDM masyarakat. Seorang dokter dan perawat pun demikian. Jika mereka bisa menyembuhkan dan menyehatkan beribu-ribu pasien dalam setahun, mereka sebenarnya telah memainkan peran politik mereka yang jauh lebih mulia daripada para politisi pencari jabatan. Sebab, masa depan sebuah bangsa dan negara akan

segera berakhir, jika mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang sakit yang tidak bisa bekerja secara efektif.

Bahkan, selain para profesional yang telah disebutkan di atas, para tukang ojek, sopir, dan pembantu rumah tangga pun mempunyai peran politik yang luar biasa besar dan penting. Sebab, jika urusan dapur, rumah tangga, dan perjalanan setiap pejabat, kaum profesional, dan semua anggota masyarakat pada umumnya tidak beres, niscaya mereka tidak akan pernah bisa bekerja dengan tenang dan efektif. Dan jika hal ini terjadi, apalagi secara masif, maka sudah pasti negara ini akan menjadi lumpuh.

Sebaliknya, jika semua komponen masyarakat tersebut memainkan peran politiknya masing-masing secara konsisten dan profesional, niscaya cita-cita perubahan menuju bangsa dan negara yang sejahtera, adil, dan beradab akan segera terealisasi. Dan inilah sesungguhnya hakikat dari pemerintahan demokratis; pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memerintah dirinya dengan cara mempertajam peran-peran politisnya atau membangun dirinya tanpa bergantung pada negara,¹¹ yang struktur pemerintahannya cenderung berbentuk piramida terbalik.

Dalam struktur pemerintahan yang berpola piramida, rakyat yang jumlahnya paling banyak, yang menempati dasar struktur atau menjadi tumpuan dari bangunan piramida itu, diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang disebut pemimpin, yang makin ke atas makin kecil dan sedikit jumlahnya.

Pertanyaannya, apakah jumlah yang kecil itu akan efektif menggerakkan mayoritas dan menghasilkan perubahan yang signifikan? Apakah pucuk piramida

¹¹ Pericles, dalam *Funeral Oration*-nya, menawarkan sistem demokrasi untuk menjaga kelangsungan kemerdekaan Athena. Menurutnya, kekuatan untuk membangun sebuah bangsa tidak hanya terletak di tangan segelintir orang, tetapi harus di tangan semua orang. Administrasi ada di tangan banyak orang, bukan hanya pada tangan sedikit orang. Konsep ini mengandung pembagian kekuasaan dan partisipasi seluruh warga negara untuk membangun negerinya. Bahkan, ia menegaskan bahwa seorang lelaki yang bisa melakukan sesuatu untuk membebaskan bangsanya dari kemiskinan, harus melakukannya dan tak boleh menghindar, entah oleh alasan apa pun. Semua potensi individu, termasuk kebebasannya, harus dikerahkan untuk kebaikan bersama. Bdk. Thucydides, "Pericles' Funeral Oration," dalam Mitchel Cohen and Nicole Fermon (eds.), *Princeton Readings in Political Thought*, (Princeton: Princeton University Press, 1996), hlm. 14-15.

yang kecil itu cukup kokoh untuk menopang dan menggerakkan bagian yang lebih besar-berat itu?

Jawabannya pasti “tidak”. Tidak mungkin pucuk piramida yang kecil itu bisa menjadi penopang dan penggerak bagian lain piramida yang lebih besar. Terbukti, setiap daerah yang mayoritas masyarakatnya masih buta huruf atau berpendidikan rendah, dan karenanya partisipasi politiknya masih sangat bergantung pada inisiatif para pemimpin, sudah pasti daerah tersebut terkategori miskin dan terbelakang. Jadi, kalau bukan mayoritas masyarakat yang aktif memerintah dan menggerakkan dirinya untuk melakukan perubahan, niscaya perubahan akan sulit terjadi. Karena itu, struktur pemerintahan dengan pola piramida terbalik ini harus diubah. Mayoritas masyarakat harus diberdayakan dan diaktifkan agar sungguh menjadi tumpuan, penopang, dan penggerak perubahan dalam masyarakat. Struktur pemerintahan yang berpola piramida itu harus berdiri dan bergerak normal; kaki yang harus bergerak melangkah, bukan kepala yang “jungkir balik” menggerakkan kaki dan seluruh badan.

Pada tataran kesadaran ini, benar apa yang dikatakan Romo Yudel, “tidak perlu seseorang menjadi politisi dan menduduki jabatan publik tertentu” untuk memainkan peran politiknya. Tidak perlu kita merebut kursi kedudukan atau takhta kuasa sebagai jaminan untuk menggagas dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Cukuplah kita mengasah semua potensi diri kita dan mempertajam peran-peran politik kita. Sebab, dengan itu, kita telah memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan dan penataan hidup bersama yang lebih baik. “Tolak takhta dan kembali ke politik”, sebab itulah inti dari demokrasi. Politik dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis adalah seni mengelola segala potensi diri dan memanfaatkannya untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Bukan sebaliknya ramai-ramai merebut kursi kekuasaan. Sebab, jika kursi kuasa menjadi fokus kita, niscaya kita hanya akan mengokohkan bangunan negara berpola piramida terbalik, yang pada saatnya akan ambruk, sebab pucuk kecil dari piramida itu tak akan pernah kuat menopang bagian lain yang makin hari makin besar dan berat.

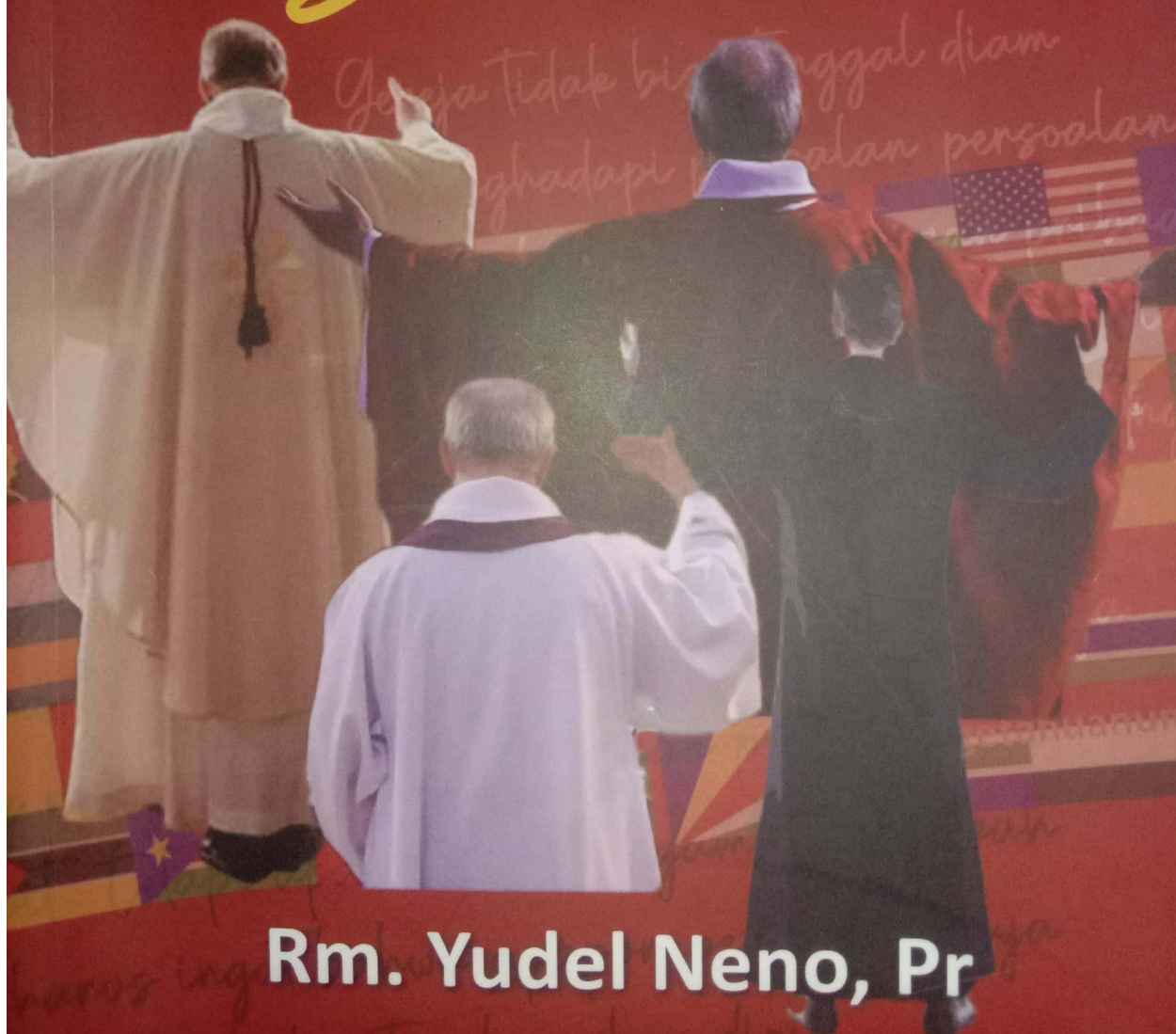
“Tolak takhta dan kembali ke politik” adalah ajakan sekaligus awasan Romo Yudel bagi semua kita agar berpolitik secara benar, yakni mengefektifkan segala potensi diri dan memanfaatkannya untuk menata hidup bersama, bukan sebaliknya

mereduksi makna politik menjadi sekadar aksi berebut kursi kekuasaan, yang pada akhirnya membuat negara ini berjalan tak normal karena mengabaikan potensi besar masyarakat yang adalah penopang sesungguhnya dari bangunan piramida sebuah negara. Negara akan menjadi kuat jika rakyatnya kuat, dan rakyat akan menjadi kuat jika peran politiknya tidak direduksinya pada sekadar aksi berebut takhta kekuasaan. Karena itu, marilah kita “menolak takhta dan kembali ke politik” agar cita-cita mencapai kebaikan bersama segera terealisasi dan dinikmati secara berkelanjutan. Selamat Membaca!*

Imam Berpolitik Bolehkah?



?



Rm. Yudel Neno, Pr

Imam Berpolitik: Bolehkah?

Gereja tidak bisa tinggal diam,
ketika menghadapi persoalan-persoalan
yang mengedepankan kepentingan pribadi dan sempit.
Tetapi apabila ia mengambil langkah,
maka ia harus ingat bahwa apapun perjuangannya,
ia tidak dapat melepaskan diri
dari iman dan moralitas Gereja

Rm. Yudel Neno, Pr



PC 01035-22

Imam Berpolitik: Bolehkah?

Rm. Yudel Neno, Pr

PENERBIT POHON CAHAYA (Anggota IKAPI)

Jl. S.O. 1 Maret (Jl. Bantul) No. 55-57

Yogyakarta 55142

Telp.: (0274) 381063

E-mail: pohoncahaya@pohoncahaya.com

Website: www.pohoncahaya.com

Cetakan ke-1 : Agustus 2022

Editor : Yulius Purnomo

Layout : Yulius Purnomo

Desain Sampul : Sigit Supradah

146 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN: 978-602-4913-46-5

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

Prolog

Tolak Takhta, Kembali ke Politik

Oleh Amandus B.S. Klau

Romo Yudel memberi judul pada bukunya, “Imam Berpolitik: Bolehkah?” Sebuah judul dalam rupa kalimat tanya, yang terasa rada gampang sekaligus sulit untuk dijawab. Mengapa?

“Apakah boleh seorang imam berpolitik” adalah sebuah pertanyaan klasik-retoris. Disebut retoris karena Romo Yudel sendiri sebagai penanya dan para pembaca sudah mengetahui jawabannya. Sedangkan, disebut klasik karena masalah yang diangkat Romo Yudel dalam bukunya itu bukanlah hal yang baru. Wacana tentang boleh atau tidak boleh seorang imam berpolitik sudah setua eksistensi Gereja itu sendiri.¹

Selain itu, jawaban boleh atau tidak boleh seorang imam berpolitik sangat bergantung pada sempit luasnya definisi

1 Sejak periode pascarasuli, tugas pelayanan pastoral para gembala secara tegas dibedakan dan dipisahkan dari tugas kaum awam. Dalam *Didache* atau salah satu tulisan awal pasca-Perjanjian baru, ditegaskan bahwa seorang gembala atau penilik harus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia harus rendah hati dan tidak tamak akan uang (tidak mencari hormat, kedudukan, dan uang). Selain itu, dalam Surat-surat Ignatius (tahun 110 Masehi), ditegaskan bahwa dalam pelayanannya, seorang imam atau penatua harus taat kepada Uskup sebagai pejabat Gereja yang mendapatkan kekuasaan dari Allah. Hal ini sangat penting, sebab pelayanan lipat tiga, yakni uskup, imam, dan penatua merupakan inti Gereja. Bdk. Derek J. Tidball, *Teologi Penggembalaan, Suatu Pengantar*, penerj. M. Rumkeny M.A. (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2021), hlm. 144-155.

dan pemahaman politik yang dimiliki oleh orang yang hendak memberikan jawaban.

Term “politik” bisa saja didefinisikan secara sangat sempit, dan karena itu menutup ruang bagi partisipasi seorang imam Katolik. Atau, sebaliknya, politik didefinisikan secara sangat luas, dan karena itu membuka ruang bagi partisipasi seorang imam Katolik.

Jika politik didefinisikan sebagai “usaha menggapai kehidupan yang baik,”² niscaya seorang imam akan terlibat dan mengambil bagian di dalamnya, sebab ia sebagai manusia tentu saja mempunyai ikhtiar untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.

Sebaliknya, jika “politik” dipahami sesempit definisi negatif Peter Merkl,³ niscaya ruang partisipasi sungguh tertutup bagi seorang imam Katolik. Merkl, secara negatif, mendefinisikan politik sebagai, “Perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.”⁴

Jika pertanyaan Romo Yudel, “bolehkah seorang imam berpolitik” diajukan dalam konteks pemahaman politik sebagaimana didefinisikan oleh Merkl, niscaya jawabannya sudah pasti, “tidak boleh”, sebab partisipasi politik seorang imam Katolik tidak bisa dijalankan di luar “koridor” atau “rambu-rambu” aturan yang telah ditetapkan oleh Gereja.

Tentang rambu-rambu tersebut, Romo Yudel menulis sebagai berikut:

-
- 2 Prof. Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 13.
 - 3 Peter Merkl adalah profesor emeritus bidang *comparative politics* pada Department of Political Science Universitas California Santa Barbara, Amerika Serikat.
 - 4 Prof. Miriam Budiarmo, *op.cit.*, hlm. 16.

Imam boleh berpolitik untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, tetapi tidak boleh berpolitik praktis.⁵ Seorang imam tidak boleh bergabung menjadi anggota salah satu partai politik, tidak boleh menjadi anggota tim kampanye dan terlibat mengampunayakan kandidat dari partai politik tertentu. Seorang imam juga tidak boleh menerima sogokan untuk memenangkan paket politik tertentu. Sebab, atas cara itu, ia mengkhinai tugasnya sendiri sebagai seorang gembala yang harus menjaga persekutuan dan persatuan umatnya.

Seorang imam tidak harus menjadi "politisi"⁶ untuk memperjuangkan kesejahteraan umum. Idealnya, politik berikhtiar mencapai kesejahteraan umum melalui perhatian dan pembuatan kebijakan. Tetapi, karena seorang imam bukanlah "politisi", maka hal yang bisa dilakukannya adalah dengan cara yang tidak melanggar aturan Gereja memperjuangkan martabat manusia, yang mencakup kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan jasmaniah.⁷

Selanjutnya, mengutip *Gaudium et Spes* (GS), Romo Yudel menambahkan bahwa, "Gereja tidak dapat dicampuradukkan dengan negara. Gereja tidak terikat pada sistem politik mana pun. Gereja dan negara sama-sama otonom dan tidak tergantung satu sama lain."⁸

5 Sebenarnya tidak ada pemisahan antara politik praktis dan politik teoretis. Yang disebut politik selalu serentak praktis dan teoretis. Sebab, suatu tindakan politik selalu merupakan aplikasi dari teori tertentu, dan sebaliknya suatu teori politik tidak pernah tidak berangkat dari praktik tertentu. Karena itu, sebutan politik praktis di sini harus dipahami sebagai politik yang berorientasi kekuasaan dan keuntungan finansial, sebagaimana definisi negatif Peter Merkl tentang politik.

6 Politisi yang dimaksudkan di sini adalah para pencari kuasa, kedudukan, dan keuntungan finansial sebagaimana definisi negatif Peter Merkl.

7 Yudel Neno, *Imam Berpolitik: Bolehkah?* Hlm. 102-103.

8 Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryan S.J., cetakan ke-9 (Jakarta: Obor 2008), hlm. 629.

Namun demikian, Gereja Katolik tetap memandang perlu mendorong negara dan para pejabatnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta memajukan dan meluaskan keadilan dan cinta kasih. Tugas Gereja Katolik adalahewartakan kebenaran Injil dan mendorong agar semua bidang manusiawi diterangi oleh ajaran Tuhan Yesus. Gereja Katolik mendukung umatnya untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pemimpin negara demi mewujudkan cita-cita keadilan, cinta kasih, dan kesejahteraan umum.

Gereja Katolik memiliki tanggung jawab teramat mulia untuk memastikan bahwa para pemimpin negara sanggup merealisasikan keadilan, cinta kasih, dan kesejahteraan umum. Gereja Katolik juga menilai dan mendorong praktik politik yang semakin diterangi oleh cinta kasih Kristus dan yang semakin memajukan harkat dan martabat manusia.

Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan praktik politik yang “diterangi cinta kasih Kristus” itu?

Setelah mencermati seluruh isi buku karya Romo Yudel ini, saya berpendapat bahwa implikasi praktis dari pandangan Gereja mengenai bagaimana seharusnya seorang imam berpolitik tidak menjadi fokus perhatian Romo Yudel. Karya yang dihasilkan Romo Yudel ini lebih layak disebut “proyek re-afirmasi”.

Seakan-akan dirinya dan para pembaca belum mengetahui sikap dan pandangan Gereja mengenai negara, politik, dan bentuk keterlibatan politik seorang imam Katolik yang dibolehkan, ia mengajukan pertanyaan, “Bolehkah seorang imam berpolitik?” Kemudian, sambil mengutip sikap dan pandangan Gereja yang tertuang dalam sejumlah dokumen, ia menegaskan bahwa seorang imam boleh berpolitik, dengan

catatan tidak boleh keluar dari batasan-batasan atau “tanda larang” aturan Gereja.

Secara akademis, “proyek re-afirmasi” atau sekadar penegasan ulang seperti ini tidak mempunyai *novelty*. Tidak ada sesuatu pun yang baru dalam karya ini, karena sang penulis hanya mengutip atau sekadar mengulang kembali isi dokumen-dokumen Gereja untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan diajukannya sebagai alasan pergulatan akademisnya.

Akan tetapi, jika dikonfrontasikan dengan realitas sosial-politik masyarakat NTT, tema yang diangkat Romo Yudel ini sangat relevan. Alasannya, partisipasi politik para imam yang cenderung menerobos batas “larangan Gereja” selalu terjadi setiap kali ada hajatan pemilihan pemimpin, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala-kepala daerah dan para wakil rakyat. Tidak jarang para pastor memberikan “mimbar gereja” kepada para calon yang didukungnya, dan sebaliknya menutup rapat-rapat bagi calon yang tidak mereka sukai. Tak jarang para pastor menyanjung pribadi dan program politik dari pasangan kandidat tertentu, dan sebaliknya mengecam habis-habisan pribadi atau program politik kandidat lain dalam khotbah-khotbah mereka.⁹

Menyikapi fenomena-fenomena politik tersebut, seruan Romo Yudel agar para pastor atau imam tidak terlibat dalam politik praktis pada satu sisi dan harus berpolitik sesuai dengan sikap dan pandangan Gereja di sisi lain menjadi relevan, penting, dan bahkan urgen untuk dibicarakan. Sebab, jika para imam turut berpolitik sesuai dengan aturan Gereja dan menyediakan prinsip subsidiaritas¹⁰ sebagai landasan pelayanan kolaboratif

9 Yudel Neno, *op.cit.* hlm. 74.

10 Prinsip subsidiaritas adalah prinsip pembagian tanggung jawab untuk

negara dan Gereja kelak, niscaya cita-cita pemuliaan harkat dan martabat manusia serta perwujudan kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat/umat dapat tercapai.

Selain itu, jika para imam tidak mengejar kekuasaan dan keuntungan lain dalam berpolitik, dan sebaliknya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab pengembalaan untuk mengarahkan politik praktis kepada suatu tindakan etis, maka sejumlah fenomena "aneh" yang meresahkan orang-orang waras di jagat politik selama ini bisa perlahan diatasi.

Fenomena paling umum dan lazim terjadi di Indonesia saat ini adalah praktik politik yang didasarkan pada kesadaran naif bahwa orang baru dapat berpolitik kalau menduduki jabatan publik tertentu.

Akibat dari kesadaran naif itu, orang beramai-ramai merebut takhta kekuasaan pada setiap hajatan politik, baik takhta kuasa legislatif maupun eksekutif. Orang menjadi tidak sadar bahwa jabatan legal formal sebagai hasil hajatan politik lima tahunan itu hanya salah satu dari sumber-sumber kekuasaan politik yang dimiliki setiap orang, yang bisa diefektifkan dan dimanfaatkan kapan pun untuk menata kehidupan bersama.

mengusahakan kepentingan masyarakat; mana yang menjadi tanggung jawab negara dan mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam prinsip ini, negara harus memberikan bantuan kepada anggota-anggotanya atau kepada komponen masyarakat sejauh anggota atau komponen itu tidak menyelesaikan tugasnya secara memuaskan. Sedangkan, apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh mereka tidak boleh diambil alih oleh negara. Negara mesti memainkan peranan yang menunjang usaha masyarakat, bukan sebaliknya menggantikan usaha masyarakat. Gereja adalah bagian dari masyarakat, yang dapat mengupayakan kesejahteraan masyarakat, karena itu negara harus memberinya ruang, bahkan berkolaborasi dengannya. Bdk. Norbertus Jegalus, "Hubungan Antara Negara dan Gereja: Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," *Jurnal Ledalero*, 12:2, (Ledalero: Desember 2013), hlm. 226.

Orang merasa tidak aneh, jika misalnya seorang profesional menyatakan dirinya baru bisa memainkan peran politiknya setelah merebut takhta kekuasaan dan menduduki jabatan publik tertentu. Orang merasa tidak aneh, jika misalnya seorang dokter, perawat, dosen, guru, ASN, pengusaha, pengurus Koperasi, arsitek, pekerja sosial, dan petani ulet meninggalkan profesi mereka dan berkontestasi merebut kursi kekuasaan legislatif dan eksekutif guna memainkan peran politik mereka.

Padahal, tanpa menjadi seorang anggota legislatif atau seorang bupati, para profesional tersebut telah memainkan peran politik mereka dan ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Seorang dosen atau guru, misalnya, sebenarnya tidak perlu mengimpikan kursi kuasa legislatif atau eksekutif, apalagi merasa lebih rendah dari seorang pejabat pemerintah. Sebab, dengan menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan siswa yang cerdas setiap tahun, mereka sebenarnya telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan SDM masyarakat. Seorang dokter dan perawat pun demikian. Jika mereka bisa menyembuhkan dan menyehatkan beribu-ribu pasien dalam setahun, mereka sebenarnya telah memainkan peran politik mereka yang jauh lebih mulia daripada para politisi pencari jabatan. Sebab, masa depan sebuah bangsa dan negara akan segera berakhir, jika mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang sakit yang tidak bisa bekerja secara efektif.

Bahkan, selain para profesional yang telah disebutkan di atas, para tukang ojek, sopir, dan pembantu rumah tangga pun mempunyai peran politik yang luar biasa besar dan penting. Sebab, jika urusan dapur, rumah tangga, dan perjalanan setiap pejabat, kaum profesional, dan semua anggota masyarakat pada umumnya tidak beres, niscaya mereka tidak akan pernah

bisa bekerja dengan tenang dan efektif. Dan jika hal ini terjadi, apalagi secara masif, maka sudah pasti negara ini akan menjadi lumpuh.

Sebaliknya, jika semua komponen masyarakat tersebut memainkan peran politiknya masing-masing secara konsisten dan profesional, niscaya cita-cita perubahan menuju bangsa dan negara yang sejahtera, adil, dan beradab akan segera terealisasi. Dan inilah sesungguhnya hakikat dari pemeritahan demokratis; pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memerintah dirinya dengan cara mempertajam peran-peran politisnya atau membangun dirinya tanpa bergantung pada negara,¹¹ yang struktur pemerintahannya cenderung berbentuk piramida terbalik.

Dalam struktur pemerintahan yang berpola piramida, rakyat yang jumlahnya paling banyak, yang menempati dasar struktur atau menjadi tumpuan dari bangunan piramida itu, diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang disebut pemimpin, yang makin ke atas makin kecil dan sedikit jumlahnya.

11 Pericles, dalam *Funeral Oration*-nya, menawarkan sistem demokrasi untuk menjaga kelangsungan kemerdekaan Athena. Menurutnya, kekuatan untuk membangun sebuah bangsa tidak hanya terletak di tangan segelintir orang, tetapi harus di tangan semua orang. Administrasi ada di tangan banyak orang, bukan hanya pada tangan sedikit orang. Konsep ini mengandung pembagian kekuasaan dan partisipasi seluruh warga negara untuk membangun negerinya. Bahkan, ia menegaskan bahwa seorang lelaki yang bisa melakukan sesuatu untuk membebaskan bangsanya dari kemiskinan, harus melakukannya dan tak boleh menghindar, entah oleh alasan apa pun. Semua potensi individu, termasuk kebebasannya, harus dikerahkan untuk kebaikan bersama. Bdk. Thucydides, "Pericles' Funeral Oration," dalam Mitchel Cohen and Nicole Fermon (eds.), *Princeton Readings in Political Thought* (Princeton: Princeton University Press, 1996), hlm. 14-15.

Pertanyaannya, apakah jumlah yang kecil itu akan efektif menggerakkan mayoritas dan menghasilkan perubahan yang signifikan? Apakah pucuk piramida yang kecil itu cukup kokoh untuk menopang dan menggerakkan bagian yang lebih besar-berat itu?

Jawabannya pasti “tidak”. Tidak mungkin pucuk piramida yang kecil itu bisa menjadi penopang dan penggerak bagian lain piramida yang lebih besar. Terbukti, setiap daerah yang mayoritas masyarakatnya masih buta huruf atau berpendidikan rendah, dan karenanya partisipasi politiknya masih sangat bergantung pada inisiatif para pemimpin, sudah pasti daerah tersebut terkategori miskin dan terbelakang. Jadi, kalau bukan mayoritas masyarakat yang aktif memerintah dan menggerakkan dirinya untuk melakukan perubahan, niscaya perubahan akan sulit terjadi. Karena itu, struktur pemerintahan dengan pola piramida terbalik ini harus diubah. Mayoritas masyarakat harus diberdayakan dan diaktifkan agar sungguh menjadi tumpuan, penopang, dan penggerak perubahan dalam masyarakat. Struktur pemerintahan yang berpola piramida itu harus berdiri dan bergerak normal; kaki yang harus bergerak melangkah, bukan kepala yang “jungkir balik” menggerakkan kaki dan seluruh badan.

Pada tataran kesadaran ini, benar apa yang dikatakan Romo Yudel, “tidak perlu seseorang menjadi politisi dan menduduki jabatan publik tertentu” untuk memainkan peran politiknya. Tidak perlu kita merebut kursi kedudukan atau takhta kuasa sebagai jaminan untuk menggagas dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Cukuplah kita mengasah semua potensi diri kita dan mempertajam peran-peran politik kita. Sebab, dengan itu, kita telah memberikan kontribusi berarti

bagi pembangunan dan penataan hidup bersama yang lebih baik. "Tolak takhta dan kembali ke politik", sebab itulah inti dari demokrasi. Politik dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis adalah seni mengelola segala potensi diri dan memanfaatkannya untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Bukan sebaliknya ramai-ramai merebut kursi kekuasaan. Sebab, jika kursi kuasa menjadi fokus kita, niscaya kita hanya akan mengokohkan bangunan negara berpola piramida terbalik, yang pada saatnya akan ambruk, sebab pucuk kecil dari piramida itu tak akan pernah kuat menopang bagian lain yang makin hari makin besar dan berat.

"Tolak takhta dan kembali ke politik" adalah ajakan sekaligus awasan Romo Yudel bagi semua kita agar berpolitik secara benar, yakni mengefektifkan segala potensi diri dan memanfaatkannya untuk menata hidup bersama, bukan sebaliknya mereduksi makna politik menjadi sekadar aksi berebut kursi kekuasaan, yang pada akhirnya membuat negara ini berjalan tak normal karena mengabaikan potensi besar masyarakat yang adalah penopang sesungguhnya dari bangunan piramida sebuah negara. Negara akan menjadi kuat jika rakyatnya kuat, dan rakyat akan menjadi kuat jika peran politiknya tidak direduksinya pada sekadar aksi berebut takhta kekuasaan. Karena itu, marilah kita "menolak takhta dan kembali ke politik" agar cita-cita mencapai kebaikan bersama segera terealisasi dan dinikmati secara berkelanjutan. Selamat Membaca!*

bagi pembangunan dan penataan hidup bersama yang lebih baik. "Tolak takhta dan kembali ke politik", sebab itulah inti dari demokrasi. Politik dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis adalah seni mengelola segala potensi diri dan memanfaatkannya untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Bukan sebaliknya ramai-ramai merebut kursi kekuasaan. Sebab, jika kursi kuasa menjadi fokus kita, niscaya kita hanya akan mengokohkan bangunan negara berpola piramida terbalik, yang pada saatnya akan ambruk, sebab pucuk kecil dari piramida itu tak akan pernah kuat menopang bagian lain yang makin hari makin besar dan berat.

"Tolak takhta dan kembali ke politik" adalah ajakan sekaligus awasan Romo Yudel bagi semua kita agar berpolitik secara benar, yakni mengefektifkan segala potensi diri dan memanfaatkannya untuk menata hidup bersama, bukan sebaliknya mereduksi makna politik menjadi sekadar aksi berebut kursi kekuasaan, yang pada akhirnya membuat negara ini berjalan tak normal karena mengabaikan potensi besar masyarakat yang adalah penopang sesungguhnya dari bangunan piramida sebuah negara. Negara akan menjadi kuat jika rakyatnya kuat, dan rakyat akan menjadi kuat jika peran politiknya tidak direduksinya pada sekadar aksi berebut takhta kekuasaan. Karena itu, marilah kita "menolak takhta dan kembali ke politik" agar cita-cita mencapai kebaikan bersama segera terealisasi dan dinikmati secara berkelanjutan. Selamat Membaca!*

Imam Berpolitik Bolehkah?

1. Gregorius Neonbasu, PhD (Dosen Antropologi pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)

Buku ini sangat pantas dibaca oleh karena memuat refleksi kritis terhadap situasi kehidupan manusia dan masyarakat saat ini dalam bingkai karya misi Gereja. Perhatian Gereja harus tertuju pada kepentingan manusia secara utuh, termasuk mata kehidupan sosial politik. Politik adalah bagian integral dari dinamika dan perubahan masyarakat, sehingga tidak boleh memandang politik sebagai sesuatu yang tabu. Profisiat untuk Rm. Yudel ya..

2. Dr. Simon Nahak, SH., MH (Bupati Malaka)

Buku *Imam Berpolitik Bolehkah*, karya Rm. Yudel menyajikan konsep-konsep brilian, yang menempatkan bagaimana posisi dan peran seorang imam di hadapan perhelatan politik. Bahwa imam karena merupakan manusia, maka keterlibatannya dalam memperjuangkan kesejahteraan umum, perdamaian dan keadilan merupakan tugas mulia, terutama demi menginjil politik dengan nilai-nilai injil.

3. dr. Agustinus Taolin, SPPD-KGEH, FINASIM (Bupati Belu)

Buku Rm. Yudel ini menyajikan konsep-konsep sehat tentang politik, yang ditinjau dari Ajaran Sosial Gereja Katolik tentang bagaimana Status dan Peran seorang imam dalam menginjil politik di zaman ini. Politik sesungguhnya merupakan medan yang perlu mendapat pencerahan dari waktu ke waktu. Dan tugas itu juga merupakan tugas seorang Imam sebagai pewarta Sabda.

4. Dr. Thomas Ola Langoday, SE., M.Si (Bupati Lembata)

Membaca Buku *Imam Berpolitik Bolehkah*, karya Rm. Yudel Neno, Saya ingat akan ekonomi keselamatan yang Allah tawarkan dan hadirkan bagi semua umat dan rakyat. Politik adalah ruang kehidupan. Bagi para Pewarta Sabda, setiap ruang yang dinamakan hidup, itu merupakan momen penginjilan. Menginjil berarti membawa kabar gembira.

Saya mengapresiasi buku ini, terutama karena tawaran nilai kegembiraan, yang memberi perspektif berbeda, bahwa seorang gembala adalah manusia, dan karena itu perjuangan kesejahteraan merupakan kodratnya. Mengapa? Karena politik selalu berurusan dengan nasib dan kepentingan banyak orang, dan persis, itulah yang dikehendaki oleh Yesus.